

**PERANAN BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA SEJAHTERA (BPMPKS) DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN
PEUDAWA KABUPATEN ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

M. AIDIL HARIYANDI
NPM :1403090007

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

ABSTRAK

PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA (BMPKS) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN PEUDAWA KABUPATEN ACEH TIMUR

Masyarakat di Kecamatan Peudawa yang belum menggunakan program KB masih banyak sekali, artinya dari jumlah KK yang besar masih ada sebagian besar yang tidak ikut program KB. Realita ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kemauan yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Peudawa masih cukup rendah. Apalagi jumlah masyarakat yang tidak mengikuti program KB semakin didukung dengan angka kelahiran yang setiap tahunnya meningkat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut rumusan masalahnya adalah bagaimana peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS) dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Aceh Timur khususnya di Kecamatan Peudawa. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS) dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Aceh Timur khususnya di Kecamatan Peudawa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya Key Informan/Narasumber. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa masyarakat di Kecamatan Peudawa yang belum menggunakan program KB masih banyak sekali disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari BPMPKS sehingga menyebabkan pemahaman masyarakat berkurang akan program keluarga berencana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa BPMPKS sebagai salah satu lembaga pemerintahan di bidang keluarga berencana sangat berperan dalam memberikan informasi akan pentingnya program keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi peledakan penduduk dan semua anggota keluarga dapat terpenuhi kebutuhannya.

Kata kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Keluarga Berencana

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan judul **“Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS) Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur”**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Sulaiman A** dan Ibuanda **Hawani SE** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu **Hj. Hanifah**, Bapak **Ir. Husni** beserta istri dan Bapak **Helmi Ridha** beserta istri, selaku Nenek dan paman saya yang juga telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu.

3. Bapak **Dr. H. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Rudianto, M.Si**, selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Drs. Zulfahmi, M.I.Kom**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dr. Arifin Saleh MSP**, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Mujahiddin, S.Sos, MSP**, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu **Dra. Yurisna Tanjung, M.Ap**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
11. Bapak/Ibu selaku staf pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS) yang tidak dapat penulis sebutkan

namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.

12. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman IKS, Chandra, Kusriman, Bg Ari, April, Rada, Riski yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, 22 Maret 2018

M. Aidil Hariyandi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 5

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 5

BAB II URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Peranan 7

B. Pengertian Pemberdayaan 8

C. Masyarakat 8

D. Keluarga 9

E. Program Keluarga Berencana..... 10

F. Ruang Lingkup KB 11

G. Tujuan Program KB 11

H. Sasaran Program KB 12

I. Strategi Program KB 13

J. Dampak Program KB 14

K. Program Keluarga Berencana Di Indonesia	14
L. Pandangan Agama Tentang Keluarga Berencana	14

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	19
B. Kerangka Konsep.....	20
C. Definisi Konsep.....	20
D. Kategorisasi.....	22
E. Narasumber	22
F. Teknik Pengumpulan Data.....	23
G. Teknik Analisis Data.....	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kependudukan lebih diarahkan pada upaya pengembangan sumber daya manusia agar penduduk makin menjadi kekuatan yang efektif dan produktif bagi pembangunan. Dalam upaya ini diusahakan ditingkatkan keterpaduan dan koordinasi upaya pengendalian kelahiran dengan berbagai kegiatan pembangunan lainnya, khususnya upaya pembangunan dibidang kesehatan, transmigrasi, pengendalian urbanisasi, pendidikan, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Usaha penurunan tingkat pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui pengendalian tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian, terutama kematian bayi dan anak. Upaya pengendalian kelahiran dilaksanakan melalui program keluarga berencana (KB). Sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat luas KB bertujuan mengatur kelahiran anak dan meningkatkan kesejahteraan ibu. Selanjutnya upaya penurunan tingkat kematian dilaksanakan dengan memperluas dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Dari berbagai pengalaman yang telah terjadi nyata sekali bahwa dalam pelaksanaan upaya pembangunan kependudukan peran serta masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan.

Dalam Upaya melaksanakan program KB, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memberikan tugasnya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS). Dengan adanya tugas dan fungsi yang luas, BPMPKS harus bisa merealisasikan nya dengan maksimal. Salah satu bidang tugas

yang diembankan kepada BPMPKS adalah bidang keluarga berencana. Dimana dalam tugas bidang keluarga berencana , BPMPKS berkoordinasi dengan BKKBN. Sehingga setiap program bidang keluarga berencana yang dilaksanakan merupakan program yang dilakukan oleh BKKBN. Salah satunya seperti yang diamanahkan oleh Keutusan Menteri dalam Negeri Nomor 411.4/1940/SJ tentang insentifkasi pengelolaan program KB.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Aceh Timur sebenarnya masih berjalan kurang baik, Jumlah KK yang telah mengikuti program KB sudah cukup banyak dari tahun 2016 dan 2017, namun kenyataannya juga juga bahwa KK yang belum mengikuti program KB di kabupaten Aceh Timur masih cukup besar. Fakta ini yang membuat BPMPKS harus lebih giat mensosialisasikan pelaksanaan program KB di wilayah Kabupaten Aceh Timur.Oleh karenanya amanah yang diberikan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, masih belum dilaksanakan secara maksimal di kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang maksimal dari BPMPKS untuk bisa memberikan informasi yang jelas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Timur tentang penting dan bermanfaatnya mengikuti program KB. Sebab dengan adanya strategi pelaksanaan program yang jelas, diharapkan setiap masyarakat dapat memahami betapa pentingnya mengikuti program KB. Selain itu juga pemahaman yang baik akan mendukung setiap masyarakat untuk bisa menyusun rencana keluarganya dan upaya menciptakan keluarga yang sejahtera.

Salah satu wilayah di Kabupaten Aceh Timur yang juga membutuhkan perhatian pelaksanaan program KB adalah Kecamatan Peudawa. Kecamatan Peudawa merupakan kecamatan yang terletak di Ibukota Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah peserta KB yang ada di Kecamatan Peudawa juga masih belum maksimal.

Masyarakat di Kecamatan Peudawa yang belum menggunakan program KB masih banyak sekali, artinya dari jumlah KK yang besar masih ada sebagian besar yang tidak ikut program KB. Realita ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kemauan yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Peudawa masih cukup rendah. Apalagi jumlah masyarakat yang tidak mengikuti program KB semakin didukung dengan angka kelahiran yang setiap tahunnya meningkat. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian pihak yang lebih dari pihak pelaksana program KB untuk lebih giat mensosialisasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat betapa bermanfaatnya mengikuti program KB dalam menyusun pendapatan keluarga yang sejahtera. Selain itu juga dari data yang diperoleh bahwa masyarakat Kecamatan Peudawa yang mengikuti program KB lebih cenderung menggunakan alat KB seperti pil dan suntikan. Kecenderungan masyarakat Kecamatan Peudawa menggunakan alat KB berbentuk pil dan suntikan disebabkan alat ini lebih praktis dan mudah digunakan., hanya saja dibutuhkan rutinitas penggunaannya dalam jangka waktu tertentu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat di kecamatan Peudawa kurang berpartisipasi dengan program KB yaitu takut efek samping dan di larang pasangan. Kasus ini terjadi di kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur. Para

ibu merasa adanya sakit dan tidak enak badan ketika menggunakan metode kontrasepsi pil maupun suntik. Mereka pun enggang memakai metode kontrasepsi lain. Sehingga terjadi jumlah anak menjadi banyak dan jarak kelahiran anak begitu dekat. Faktor lain pun ada yakni di larang oleh suami menggunakan alat kontrasepsi, dengan alasan nanti pakai KB sama aja nanti membunuh anak yang di titipan dari Allah. Selain efek samping menurunnya libido sang istri jika menggunakan alat kontrasepsi membuat suami melarang istrinya ber KB. Sehingga istri sembunyi sembunyi ke bidan desa maupun ke puskesmas untuk berKB tanpa sepengetahuan suami.

Masyarakat di kecamatan Peudawa juga selalu menanamkan prinsip Aneuk Bak Allah yaitu anak itu dari Allah. Mereka pun juga beranggapan hidup mati adalah takdir dan setiap anak ada rezekinya masing-masing. Secara keseluruhan Aceh ini masih luas tidak seperti di Jawa, di sini jarak dari suatu rumah ke rumah yang lain masih berjauhan jadi masih cukup di untuk di tambah penduduk. Waktu tsunami dulu ratusan ribu orang masyarakat Aceh meninggal, sebelum itu juga di Aceh ada konflik yang banyak memkanya korban, jadi kita masih perlu menambah generasi. Ada juga warga yang meragukan apakah alat alat kontrasepsi itu atau tidak oleh aturan agama. Dengan kata lain, KB bagi mereka belum menjadi bagian kehidupan sehari hari. Masyarakat di kecamatan Peudawa masih ada kaitan dengan adat istiadat tersebut dalam hal ini bisa di lihat dari peristiwa kelahiran, ada pergaulan muda mudi, adat upacara perkawinan dan adat acara upacara kematian. Ada sebagian masyarakat juga menganggap anak itu

penerus agama untuk memperbanyak umat bahkan ternyata ada banyak keluarga yang anaknya berjumlah 5 keatas.

Dengan ketidakberjalannya program keluarga berencana, maka kecamatan peudawa turut berkontribusi dalam penambahan kualitas, dari penelusuran peneliti, mayoritas anak bersekolah sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), tidak banyak yang sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapula anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan do sekolah dasar (SD) karena ikut membantu ayahnya untuk berkebun sawit.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BMPKS) dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Aceh timur khusus nya di Kecamatan Peudawa?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BMPKS) dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Aceh timur khusus nya di Kecamatan Peudawa.

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Aceh timur di Kecamatan Peudawa

Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu kesejahteraan sosial khususnya di lembaga Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga sejahtera (BPMPKS) terutama yang berkenaan dengan praktek Program keluarga Berencana di masyarakat yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat yang merupakan objek dari ilmu kesejahteraan sosial itu sendiri

2. Bagi lembaga akedemisi

Dapat menjadi bahan referensi dalam melaksanakan Program keluarga Berencana baik secara teori ataupun praktik.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan akan pentingnya program keluarga berencana sebagai cara untuk menekan peledakan penduduk.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Peranan

Menurut Katz dan Kahn (dalam Mifta Thoha, 2002) Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristik pribadi seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya dan kemauannya untuk mentaati yang telah menetapkan pengharapan tadi. Sementara menurut Hari Soegiman, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet (1985) yang mendefinisikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat, Sedangkan Astrid S. Susanto (1979) menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

Dalam kamus bahasa Inggris, Peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Dari beberapa pengertian peranan diatas, dalam penelitian ini peranan di definisikan sebagai aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan yang menentukan suatu kegiatan yang menentukan suatu proses keberlangsungan.

B. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Dauly (2006) Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar memiliki posisi tawar sehingga mampu menjadi pelaku dalam proses pembangunan yang partisipatif dan aktif. Sedangkan Menurut Slamet (2003) definisi pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya. Arti ini secara tidak langsung pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan peluang sehingga mampu mengambil suatu keputusan yang tepat yang sesuai dengan inisiatifnya.

Menurut Sumodiningrat (1999) arti pemberdayaan adalah serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluas segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat. Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong kepercayaan diri masyarakat sehingga bisa bersaing dalam menumbuhkan atau meningkatkan perekonomiannya.

C. Pengertian Masyarakat

- Menurut Emiel Durkheim, pengertian masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari individu-individu yang merupakan anggotanya.
- Karl Marx : Pengetian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena

adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi.

- Max Weber : Masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
- Sedangkan menurut Selo soemardjan, pengertian masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
- Dari beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada pada kelompok tersebut.

D. Pengertian Keluarga

Menurut Duvall Dan Logan (1986) keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta social dari tiap anggota keluarga. Sedangkan menurut Narwoto & Suyanto (2004) keluarga merupakan lembaga social dasar dari mana semua lembaga atau pranata social lainnya berkembang, di masyarkat mana pun dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.

Menurut Departemen Kesehatan RI (1988) keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan, sedangkan menurut UU No 10 Tahun 1992 mendefinisikan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian keluarga secara umum adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu ata dalam keadaan saling ketergantungan.

E. Pengertian Program keluarga Berencana

Menurut K.H Bisri Musthofa, KB adalah merencanakan/mengatur jumlah dalam keluarga yang disukai atau karena terlalu sering istrinya melahirkan, sehingga perlu mengadakan pembatasan (penjarangan kelahiran), sedangkan menurut Mukhti Ali KB merupakan sebagai upaya ikhtiar untuk memberikan jaminan kesehatan, untuk sang anak maupun ibu, jaminan kependidikan, karena pendidikan merupakan bekal yang sangat berharga untuk kehidupan kelak dalam masyarakat, untuk memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran keluarga lahir dan bathin.

Menurut Marjo Sir, KB adalah menjarangkan/mengatur kehamilan dengan harapan perhitungan keseimbangan ekonomi, baik untuk pendidikan anak-anak dll, sedangkan menurut Masfuk Zuhdi, KB ditekankan jumlah

besar kecilnya anggota keluarga yang lazim ditentukan dengan jumlah anak. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan Program keluarga berencana adalah sebagai suatu usaha yang disengaja untuk mengatur masalah kependudukan yang mana penduduk merupakan unsure penting bagi negara, tanpa adanya penduduk tidak mungkin akan adanya sebuah negara.

F. Ruang Lingkup KB

Ruang lingkup KB antara lain : Keluarga berencana, Kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, keserasian kebijakan kependudukan, pengelolaan SDM aparatur, penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

G. Tujuan Program KB

Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi satu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memnuhi kebutuhan hidupnya.

Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, penewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Kesimpulan dari tujuan program KB adalah memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa, mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa, memenuhi permintaan

masyarakat akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

Tujuan KB berdasarkan perencanaan strategi 2005-2009 meliputi :

1. Keluarga dengan anak ideal
2. Keluarga sehat
3. Keluarga berpendidikan
4. Keluarga sejahtera
5. Keluarga berketahanan
6. Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya
7. Penduduk tumbuh seimbang

H. Sasaran Program KB

Sasaran Program KB tertuang dalam RPJMN 2004-2009 yang meliputi :

1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen
2. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per tahun.
3. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) menjadi sekitar 2,2 per perempuan
4. Menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/ cara kontrasepsi menjadi 6%.

5. Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5 persen.
6. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien.
7. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun.
8. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak.
9. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi produktif.
10. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan program KN nasional.

I. Strategi Program KB

Strategi program KB terbagi dalam dua hal yaitu :

1. Strategi dasar
 - Meneguhkan kembali program di daerah.
 - Menjamin kesinambungan program
2. Strategi Operasional
 - Peningkatan kapasitas sistem pelayanan program KB Nasional
 - Peningkatan kualitas dan prioritas program
 - Penggalangan dan pemantapan komitmen
 - Dukungan regulasi dan kebijakan
 - Pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas pelayanan.

J. Dampak Program KB

Program keluarga berencana memberikan dampak, yaitu penurunan angka kematian ibu dan anak, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan mutu dan layanan KB-KR, peningkatan sistem pegelolaan dan kapasitas SDM, pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar.

K. Program Keluarga Berencana Di Indonesia

Upaya peningkatan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera (Undang-undang No. 10/1992).

Keluarga berencana : Suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.

WHO (Expert commite, 1970), tindakan yang membantu individu/pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

L. Pandangan Agama Tentang Keluarga Berencana

Keluarga berencana termasuk masalah yang kontroversial sehingga tidak ditemukan oleh imam-imam madzhab. Secara umum, hingga kini dikalangan umat islam masih ada dua kubu antara yang membolehkan keluarga berencana dan yang menolak keluarga berencana. Ada beberapa alasan dari para ulama yang

memperbolehkan keluarga berencana, diantaranya dari segi kesehatan ibu dan ekonomi keluarga. Selain itu, program keluarga berencana juga didukung oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui, sejak 1970, program keluarga berencana nasional telah meletakkan dasar-dasar mengenai pentingnya perencanaan dalam keluarga. Intinya, tentu saja untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang berkaitan dengan masalah dan beban keluarga jika kelak memiliki anak. Di lain pihak, beberapa ulama berpendapat bahwa keluarga berencana itu haram.

Oleh karena itu, mereka tidak memperbolehkan keluarga berencana. Maka dari itu, kita harus mempelajari pengetahuan tentang keluarga berencana dari beberapa sudut pandang sehingga bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas serta meyakinkan masyarakat tentang hukum keluarga berencana. Rasulullah SAW sangat mengtanjurkan umatnya untuk memiliki keturunan yang sangat banyak. Namun tentunya bukan asal banyak, tetapi tetapi berkualitas sehingga perlu dididik dengan baik supaya dapat mengisi alam semesta ini dengan manusia yang shalih dan beriman. Contoh metode pencegah kehamilan yang pernah dilakukan masa Rasulullah SAW adalah azl yakni mengeluarkan air mani diluar vagina istri atau yang lazim disebut sanggama terputus, namun tidak dilarang oleh Rasul. Sedangkan metode pada zaman ini yang tentunya belum pernah pada zaman Rasulullah SAW membutuhkan kajian yang mendalam dan melibatkan ahli medis dalam menentukan kebolehan dan keharamannya. Kita mengenal keluarga berencana sebagai metode yang dipakai untuk mencegah kehamilan. Hal tersebut

yang paling sering diperdebatkan dalam islam. Hukum keluarga berencana dalam islam dilihat dari 2 pengertian :

-Taahdid an-nasl (pembatasan kelahiran)

Jika program keluarga berencana dimaksudkan untuk membatasi kelahiran, maka hukumnya haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran. Bahkan terdapat banyak hadits yang mendorong umat islam untuk memperbanyak anak. Misalnya, tidak bolehnya membunuh anak apalagi takut miskin atau tidak mampu memberi nafkah.

-Tanzim an-nasl (pengaturan kelahiran)

Jika program keluarga berencana dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dengan berbagai cara dan sarana, maka hukumnya mubah, bagaimanapun motifnya.

Berdasarkan keputusan yang telah ada sebagian ulama menyimpulkan bahwa pil-pil untuk mencegah kehamilan tidak boleh dikonsumsi. Karena Allah SWT mensyariatkan untuk hamba-Nya sebab-sebab untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak umlah umat.

Karena umat itu membutuhkan jumlah yang banyak, sehingga mereka beribadah kepada Allah, dan Allah akan menjaga mereka dan tipu daya musuh-musuh mereka. Maka wajib untuk meninggalkan perkara ini (membatasi kelahiran), tidak membolehkannya dan tidak menggunakannya kecuali darurat. Jika dalam keadaan darurat maka tidak mengapa, seperti :

-Sang istri tertimpa penyakit di dalam rahimnya, atau anggota badan yang lain, sehingga berbahaya jika hamil, maka tidak mengapa (menggunakan pil-pil tersebut) untuk keperluan ini.

-Demikian juga, jika sudah memiliki banyak anak, sedangkan istri keberatan jika hamil lagi, maka tidak terlarang mengkonsumsi pil-pil tersebut dalam waktu tertentu, seperti setahun atau dua tahun dalam masa menyusui, sehingga ia merasa ringan untuk kembali hamil, sehingga ia bisa mendidik dengan selayaknya.

Adapun jika penggunaannya dengan maksud berkonsentrasi dalam berkarier atau supaya hidup senang atau hal-hal lain yang serupa dengan itu, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan wanita zaman sekarang, maka hal itu tidak boleh. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu misalnya untuk menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak diantara dua kelahiran, untuk menjaga keselamatan jiwa, kesehatan atau pendidikan anak-anak. Namun keluarga berencana bisa menjadi tidak diperbolehkan apabila dilandasi dengan niat dan alasan yang salah, seperti takut miskin, takut tidak bisa mendidik anak, dan takut mengganggu pekerjaan orang tua. Dengan kata lain, penilaian tentang keluarga berencana tergantung pada individu masing-masing.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi
- b. Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi.
- c. Meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Moleong (2006:05) Penelitian kualitatif merupakan Penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku individu dan sekelompok orang.

Penelitian kualitatif yang dapat disimpulkan dari definisi para ahli adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan cara deskriptif analisis kualitatif suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan wawancara secara terbuka.

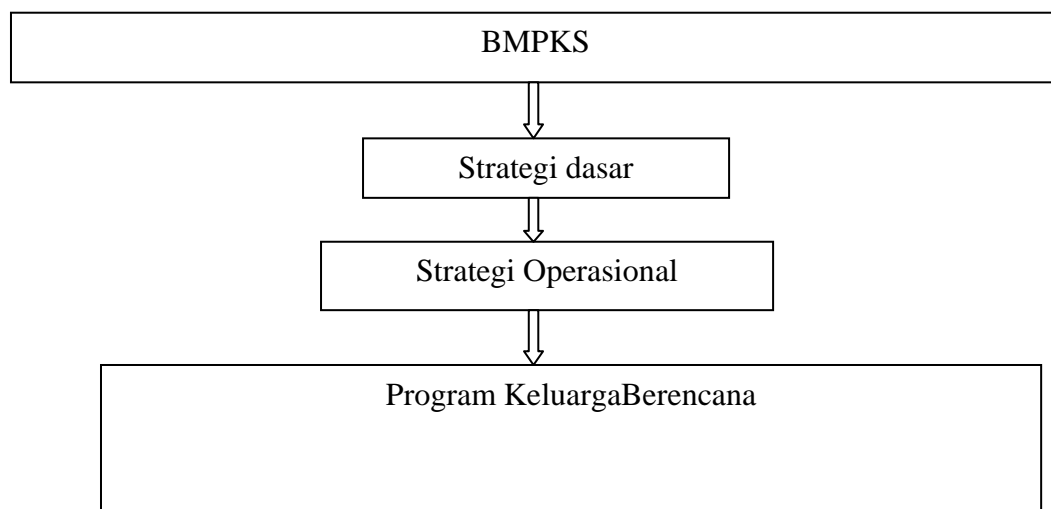
Agar penelitian dapat memenuhi kriteria ilmiah maka cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sampai analisis data, diusahakan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan metode yang ada. Sesuai dengan perubahan metode dan prosedur penelitian ini, maka akan dibahas tentang jenis penelitian, populasi, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

B. Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BMPKS) dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Aceh timur khususnya di Kecamatan Peudawa. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1

KERANGKA KONSEP



C. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti.

a. Strategi dasar

- Meneguhkan kembali program di daerah.
- Menjamin kesinambungan program

b. Strategi Operasional

- Peningkatan kapasitas sistem pelayanan program KB Nasional
- Peningkatan kualitas dan prioritas program
- Penggalangan dan pementapan komitmen
- Dukungan regulasi dan kebijakan
- Pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas pelayanan.

c. Program keluarga berencana

Usaha penurunan tingkat pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui pengendalian tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian, terutama kematian bayi dan anak. Upaya pengendalian kelahiran dilaksanakan melalui program keluarga berencana (KB). Sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat luas KB bertujuan mengatur kelahiran anak dan meningkatkan kesejahteraan ibu. Selanjutnya upaya penurunan tingkat kematian dilaksanakan dengan memperluas dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Dari berbagai pengalaman yang telah terjadi nyata sekali bahwa dalam pelaksanaan upaya pembangunan kependudukan peran serta masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel hingga dapat diketahui apa yang menjadi tolak ukur dalam menganalisis data dari suatu penelitian.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
2. Adanya komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
3. Adanya akuntabilitas untuk penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan.
4. Adanya transparansi untuk mengukur kejelasan sasaran program pelaksanaan Keluarga Bencana yang sudah diberikan.

E. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Dinas BPMPKS Aceh Timur

Nama : Azhari, S.Pd, M.Si

Umur : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

2. Kepala Puskesmas Kecamatan Peudawa

Nama : Basri

Umur : 51 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

3. Tokoh Masyarakat

Nama : Muhammad Wisnu

Umur : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

4. Tokoh Masyarakat

Nama : Teuku Riyan

Umur : 56 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

5. Masyarakat Biasa

Nama : Cut Nanda

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

F. Teknik pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data, berupa dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang bersangkutan.

b) Wawancara yang mendalam (*Deep Interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan-informan. Kemudian hasil jawaban yang diperoleh dari informan tersebut dikemas dalam tulisan yang tidak merubah makna dari inti jawaban dari setiap informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

G. Teknik Analisa Data

Data dalam metode Kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka. Maleong dalam Kriyantono (2007:163) mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data reduction*): Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2010: 63).

2. Pengumpulan Data (*Data collection*): Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian Data (*Data Display*): Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*): Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
5. Evaluasi: Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Peudawa

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur Aceh Timur. Masyarakat di kecamatan Peudawa yang belum menggunakan program KB masih banyak sekali disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari BPMPKS sehingga menyebabkan pemahaman masyarakat berkurang akan program keluarga berencana. Kecamatan Peudawa adalah sebuah desa kecil yang terletak di Propinsi Aceh. Kecamatan Peudawa terletak +/- 12 Km dari Ibu Kota Aceh Timur, dan +/- 5 Km dari Ibu Kota Kecamatan Aceh Timur dengan luas wilayah 12,23 km. Iklim di Kecamatan Peudawa, sebagaimana di Desa-Desa lain di Indonesia beriklim tropis, pancaroba dan penghujan, hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat yang ada di Kecamatan Peudawa. Kecamatan Peudawa terdiri dari 2 (Dua) Dusun yaitu Dusun Kecamatan Peudawa dan Dusun Wasikondu yang memiliki penduduk 1078 jiwa, dengan jumlah KK=282, RTM = 233 KK, RTSM= 96 KK. Mata pencaharian warga Kecamatan Peudawa adalah petani, selain itu warga Kecamatan Peudawa berprofesi sebagai pedagang, tukang, peternak, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebanyak 65 % Kecamatan Peudawa tergolong sebagai KK miskin dengan penghasilan rata-rata Rp 40.000 per hari.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan

No.	Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1	Kecamatan Peudawa	303	204	507	127
2	Alue Bu	350	221	571	155
Jumlah Total		653	425	1078	282

Sumber: Kantor Kecamatan Peudawa Tahun 2017

Dari tabel jumlah penduduk diatas menunjukkan bahwa, Kecamatan Peudawa terdiri dari 2(Dua) dusun, yaitu Dusun Kecamatan Peudawa dan Dusun Alue Bu, memiliki jumlah penduduk sebanyak 1078 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 507, dan perempuan berjumlah 571, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 282 jiwa.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Peudawa

No	Tingkat Pendidikan	Orang (Jiwa)
1	TT SD	140
2	SD	206
3	SMP	273
4	SMA	105
5	DIPLOMA	24
6	SARJANA	44

Sumber : Kantor Kecamatan Peudawa Tahun 2017

Dari tabel tingkat pendidikan diatas menunjukkan bahwa, pendidikan masyarakat Kecamatan Peudawa masih sangat rendah dimana masyarakat yang Tidak Tamat SD sebanyak 140 orang, dan yang tamat SD sebanyak 206, SMP sebanyak 273 orang, SMA sebanyak 105 orang dan masyarakat yang jenjang pendidikan Diploma sebanyak 24 orang, serta masyarakat yang jenjang pendidikan Sarjana mencapai 44 orang.

2. Struktur Organisasi

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik Kecamatan Peudawa, maka perangkat kerja organisasi masalah Pengelolaan Program Keluarga Berencana dan peningkatan pembangunan fisik menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Badan, dan Bendahara Badan yang ditunjuk langsung oleh Kepala Kecamatan Peudawa.

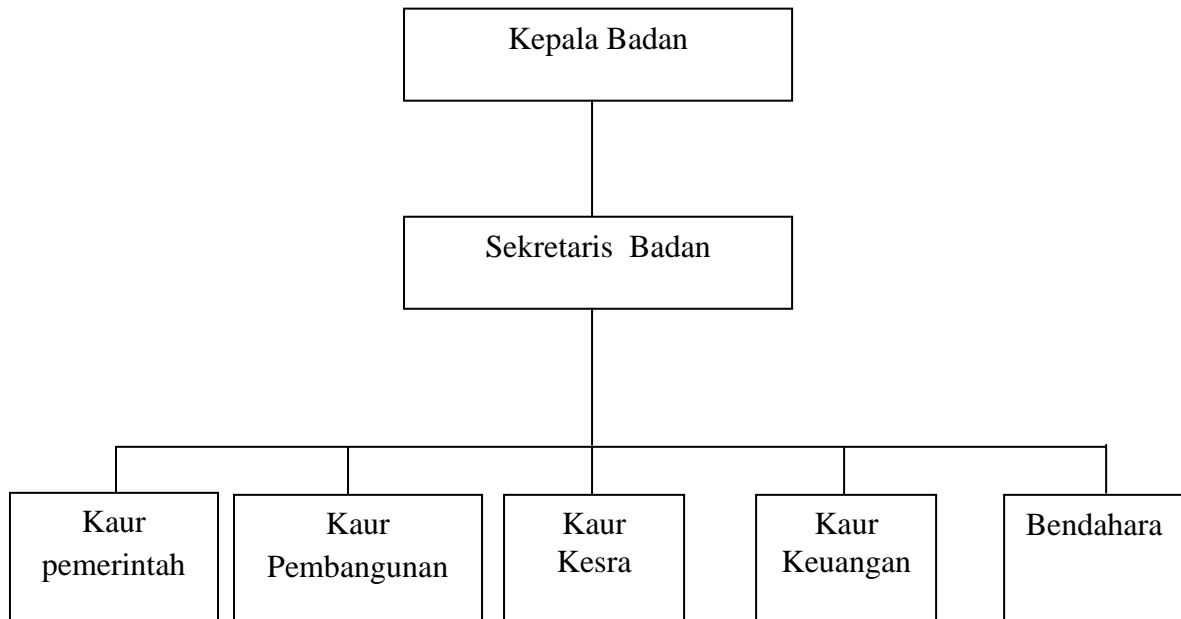
Struktur organisasi Kecamatan Peudawa dalam bidang Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik dilengkapi pula dengan tim pengawasan oleh BPD serta pelaksana perencanaan yaitu kaur pembangunan, sehingga peningkatan pembangunan fisik di Kecamatan Peudawa dapat mencapai target yang optimal.

Pembentukan organisasi dalam lingkup pemerintah Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur agar terjadi sinkronisasi dan etos kerja yang sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam mengoptimalkan efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur. Selain dari bidang teknis dan pengelolaan Program Keluarga Berencana yang merupakan teknisi Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur Aceh Timur, juga terdapat bidang lain yang menunjang termaksud Sekretaris Desa yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang bekerja langsung di lapangan. Adapun struktur organisasi Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur, sebagaimana di

kemukakan pada gambar berikut

Gambar IV.1

Struktur Organisasi



Sumber : Kantor Kecamatan Peudawa

Gambar IV.2

Proses Wawancara Bersama Kepala BPMPKS



3. Deskripsi Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemerintah Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur dan masyarakat Kecamatan Peudawa yang berjumlah sebanyak 30 orang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan responden, dimana peneliti melakukan wawancara langsung disetiap rumah responden, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang responden. Deskripsi responden pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Ringkasan dari deskripsi responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Laki-Laki	25	83,33
2	Perempuan	5	16,67
Total		30	100

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden laki-laki yaitu sebanyak 25 orang atau sebesar 83,33% sedangkan sisanya sebanyak 5 orang adalah responden perempuan dengan presentase 16,67%.

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	<30 Tahun	-	-
2	30-40 Tahun	4	27,33
3	41-50 Tahun	8	26,67
4	>50 Tahun	27	60
Total		30	100

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Usia, di Desa Penelitian antara lain berusia diatas 50 tahun sebanyak 27 orang (60%), kemudian responden dengan usia 41 - 50 tahun

sebanyak 8 orang (26,67%) sedangkan sisanya usia 30 – 40 tahun sebanyak 4 orang (27,33%).

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Tidak Sekolah	1	3,33
2	SD	1	3,33
3	SMP	5	16,67
4	SMA/SMK	27	43,33
5	Diploma	3	10
6	S1	7	23,33
Total		30	100

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan tingkat pendidikannya, yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK dengan presentase 43,33% atau sebanyak 27 orang, kemudian yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 7 orang dengan presentase 23,33% kemudian sebanyak 5 orang dengan presentase 16,67% adalah responden dengan tingkat pendidikan SMP, kemudian yang memiliki tingkat pendidikan Diploma sebanyak 3 orang dengan presentase 10% dan masing-masing sebanyak 3 orang responden memiliki tingkat pendidikan SD dan tidak sekolah.

4. Program BPMPKS dalam pelaksanaan program keluarga berencana Aceh Timur khususnya di kecamatan peudawa

Masyarakat di kecamatan Peudawa yang belum menggunakan program KB masih banyak sekali disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari BPMPKS sehingga menyebabkan pemahaman masyarakat berkurang akan program keluarga berencana. Pengelolaan Program Keluarga Berencana mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun

2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Program Keluarga Berencana.

Program Keluarga Berencana adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Program Keluarga Berencana merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

5. Tujuan dari peran badan pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga sejahtera

Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Di Kecamatan Peudawa agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

6. Hambatan dalam mencapai pelaksanaan program keluarga berencana aceh timur khusus nya di kecamatan peudawa

Tahap perencanaan Pengelolaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur, telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana Program Keluarga Berencana yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Kecamatan Peudawa Dalam Kegiatan Musrembang.

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persen (%)
		Hadir	20	66,66
	Kegiatan	Hadir dan	-	-
	Musrembang	Berpendapat		
		Tak hadir	10	33,33
		Total	30	100
		Jumlah	20	66,67
		Anggaran		
Perencanaan	Pokok	Penyusunan	3	10
	Bahasan	Rencana		
		Tidak tahu	7	23,33
		Total	30	100
		Tersusunya	-	-
		DURK		
	Hasil	Belum	23	76,67
	Musrembang	Tersusunya		
		DURK		
		Tidak tahu	7	23,33
		Total	30	100
	Sosialisasi	Ada	3	10
	DURK	Tidak ada	21	70
	Kepada	Tidak tahu	6	20
	masyarakat	Total	30	100

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 30 responden kalangan masyarakat, sebanyak 20 orang atau 66,66 % yang menghadiri kegiatan musrembang desa tersebut, tetapi mereka tidak menyampaikan aspirasi/usulan rencana kegiatan. Sedangkan 10 orang atau 33,33 % lainnya tidak hadir.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Kecamatan Peudawa

yaitu Bapak Juliarso mengenai tahapan Perencanaan pengelolaan ADD dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut:

“Dalam proses musrembang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sedikit sekitar 15% dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.”(Wawancara 27 Februari 2027).

Selanjutnya Tabel 4.6 diatas juga menunjukkan bahwa dalam proses musrembang desa pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dari 30 responen, hanya 3 orang atau 10 % yang mengatakan bahwa dalam musrembang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan, sebanyak 20 orang atau 66,67 % lainnya mengatakan bahwa dalam musrembang pemerintah desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa, dan sisanya sebanyak 7 orang atau 25,93 % mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Isroq Suyoto yang mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, di tambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir ,karena memang kami tidak tahu harus bicara apa.”(Wawancara 27 Februari 2027).

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Kecamatan Peudawa tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Dalam tabel 4.6 Terlihat bahwa 30 orang responden, seluruh responden yang hadir yaitu sebanyak 23 atau 76,67 % sependapat bahwa tidak ada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan. Sedangkan 7 orang responden lainnya atau 23,33 % mengatakan tidak tahu sebab mereka tidak menghadiri kegiatan musrembang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan pembangunan fisik Kecamatan Peudawa.

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Kecamatan Peudawa yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana penegelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik Kecamatan Peudawa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Peudawa, yaitu bapak M. Husni Saragih, SH yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan musrembang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran Program Keluarga Berencana tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak, baik perencanaan pembuatan pasar dan pembuatan sumur gali yang kemudian nantinya akan disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan mesin penarik air.”(Wawancara

tanggal 27 Februari 2027).

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali di informasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat. Akan tetapi, dari tabel 4.2.1 diatas terlihat bahwa dari 30 orang total responden hanya 3 orang atau 10 % mengatakan bahwa DURK di informasikan kepada masyarakat, sebanyak 21 orang atau 70% mengatakan bahwa tidak ada informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 6 orang atau 20% mengatakan tidak tahu.

Berikut hasil wawancara dengan Bendahara Kecamatan Peudawa yaitu Juni Intani, S.Pd yang mengatakan bahwa:

“Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Peudawa inimemang tidak pernah disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.Masyarakat hanya dijadikan penonton yang menyaksikan setiap kegiatan yang terjadi di desa.”(Wawancara 27 Februari 2018).

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu Bapak Juliarso selaku Kepala Desa, M. Husni Saragih, SH selaku Sekretaris Desa, Juni Intani, S.Pd selaku Bendahara dan Bapak Isroq Suyoto Serta Bapak Sujarwo Selaku Masyarakat Kecamatan Peudawa. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyakat dan kurangnya transparasi dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Program Keluarga Berencana, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengeloaan Program Keluarga Berencana dalam

meningkatkan pembangunan fisik Kecamatan Peudawa.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Program Keluarga Berencana yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur masih kurang baik.

7. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Program Keluarga Berencana

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik, dengan anggaran Program Keluarga Berencana di Kecamatan Peudawa didasarkan pada peraturan Bupati Aceh Timur No. 27 tahun 2012 tentang pengelolaan Program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD, serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2012 tentang penetapan besaran Program Keluarga Berencana minimum dan Program Keluarga Berencana proporsional di lingkungan pemerintah Aceh Timur Tahun anggaran 2015, besaran Program Keluarga Berencana yang diperoleh Kecamatan Peudawa adalah sebesar Rp.283.984.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Adapun terkait efektifitas Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kecamatan Peudawa dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.7 Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2017

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persen (%)
Pembangunan Desa	Pembangunan Pasar	175.152.000	61,67
	Pembuatan Sumur	12.152.000	4,27
	Bibit Pala	96.680.000	34,04
Total		283.984.000	100

Sumber :Diolah dari laporan pertanggung Jawaban Kecamatan Peudawa Tahun 2017

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah Program Keluarga Berencana yang diterima oleh Kecamatan Peudawa adalah sebesar Rp 283.984.000, dimana pengalokasian anggaran Program Keluarga Berencana oleh pemerintah Kecamatan Peudawa diperuntuhkan untuk pembangunan desa dengan jenis kegiatan yakni, pembangunan pasar Kecamatan Peudawa dengan anggaran sebesar Rp 175.152.000 atau sekitar 61,67 %, pembuatan sumur gali dengan anggaran sebesar Rp 12.152.000 atau sekitar 4,27 %, dan pengadaan bibit pala dengan anggaran sebesar Rp 96.680.000 atau sekitar 34,04 %.

Informasi yang diperoleh dari 30 responden terkait tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Peudawa bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Program Keluarga Berencana

masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Kecamatan Peudawa yaitu pembangunan pasar dan pembuatan sumur gali, serta pengadaan bibit pala. Informasi yang diperoleh dari 30 responden bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada sama sekali partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Kecamatan Peudawa yaitu Bapak Juliarso yang menyatakan bahwa:

“Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sangat rendah, jangan dipanggil untuk bekerja, dipanggil pada saat musrembang saja untuk sosialisasi sangat susah.”(Wawancara 27 Februari 2018).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa. Hal ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat, yaitu Bapak Sujarwo yang menyatakan bahwa:

“Banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja Kepala Desa sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari

desa.”(Wawancara 28Februari 2018).

Pendapat lain yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Peudawa yaitu Bapak Isroq Suyoto yang menyatakan bahwa:

“Kondisi desa saat ini sudah sangat jauh dengan slogan-slogan yang melekatpada desa, seperti kehidupan desa yang harmonis, rasa persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat desa yang tinggi.Terlibatnya masyrakat dalam politik sangat merusak hubungan silaturahmi antar masyarakat.”(Wawancara 27 Februari 2018).

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Peudawa ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan pasar dengan anggaran 175.152.000 dan pembuatan sumur gali dengan anggaran sebesar 12.152.000, serta pengadaan bibit pala dengan anggaran sebesar 96.680.000 dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Program Keluarga Berencana yang dilakukan di Kecamatan Peudawa belum efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, salah satunya Masyarakat Kecamatan Peudawa, Bapak Sujarwo yang menyatakan bahwa:

“Banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulaidari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan kantor desa tidak pernah terbuka.”(Wawancara 27 Februari 2018r).

Pendapat lain terkait belum efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan Program Keluarga Berencana, disampaikan oleh Sekretaris Desa yakni Bapak M. Husni Saragih, SH menyatakan bahwa:

“kegiatan pembangunan desa yakni salah satunya pembangunan pasar Kecamatan Peudawa sebenarnya sudah cukup baik karena akan mempermudah masyarakat dalam menjual hasil tani mereka tanpa harus pergi di desa tetangga. Namun hal ini tidak efektif karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh desa masyarakat dan itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa”(wawancara 30 Februari 2027).

Melihat berbagai masalah diatas, walaupun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kecamatan Peudawa dapat dikatakan kurang efektif.

8. Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Program Keluarga Berencana

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak di susun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggung Jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga Kecamatan Peudawa serta tidak ada transparansi kepada masyarakat,

sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Program Keluarga Berencana.

Tabel 4.8 Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD

Variable	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persen (%)
Pertanggung Jawaban	Pihak penyusunan LPJ	Pemerintah desa bersama BPD	5	16,67
		Pihak lainya	7	23,33
		Tidak tahu	27	60
		Total	30	100
	Kualitas LPJ	Baik	19	63,33
		Tidak tahu	11	36,67
		Total	30	100
	Evaluasi Kegiatan Bersama masyarakat	Ada	2	6,67
		Tidak ada	24	80
		Tidak tahu	4	27,33
		Total	30	100

Sumber :Diolah dari Kantor Kecamatan Peudawa Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 5 orang atau 16,67% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa bersama BPD, sedangkan 7 orang lainnya atau 23,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban disusun oleh pihak lainnya yaitu pihak ketiga yang bukan berasal dari unsur pemerintah atau lembaga Kecamatan Peudawa. Sedangkan sisanya sebanyak 27 orang atau 60% tidak mengetahui siapa pihak yang menyusun laporan pertanggungjawaban Kecamatan Peudawa tersebut dan hasil penelitian menunjukkan bahwa, laporan pertanggungjawaban Kecamatan Peudawa memang tidak disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan

Bendahara Kecamatan Peudawa yaitu Juni Intani, S.Pd yang menyatakan bahwa:
“Kualitas SDM pemerintah Kecamatan Peudawa ini memang masih tergolong sangat rendah, selain memang karena rata-rata hanya tamatan SMA , pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Program Keluarga Berencana sebanyak ini dan yang menjadi penghambat kami sebagai pemerintah desa juga data yang kami miliki tidak tersimpan sehingga kami kesulitan dalam mengelola anggaran tersebut dan juga kami sangat tidak memahami dalam pengoperasian komputer.”(Wawancara 27 Februari 2018)

Pernyataan diatas didukung pula oleh hasil wawancara dengan Bapak M. Husni Saragih, SH selaku Sekretaris Kecamatan Peudawa, yang menyatakan bahwa:

“Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kecamatan Peudawa memang belum disusun oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab kegiatan yang ada di desa, dikarenakan kualitas sumberdaya aparatur desa sangat rendah atau belum memadai untuk menyusun LPJ, tetapi hal ini harus dimaklumi karena ini merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa, khususnya di Kecamatan Peudawa ini.”(Wawancara 27 Februari 2018).

Selanjutnya pada tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Kecamatan Peudawa sudah baik, dimana dari 30 responden sebanyak 19 orang atau 63,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang

dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Peudawa dijadikan percontohan untuk semua desa di kecamatan Aceh Timur. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Kecamatan Peudawa yaitu Bapak Juliarso, yang mengemukakan bahwa:

“Kecamatan Peudawa ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban, selain selalu tepat waktu, LPJ Kecamatan Peudawa telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh desa yang ada di kecamatan Aceh Timur.”(Wawancara 28 Februari 2018).

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan hasil wawancara dengan Bendahara Kecamatan Peudawa yaitu Juni Intani, S.Pd, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kecamatan Peudawa sangat baik dalam menyusun laporan pertanggungjawabab atas penggunaan anggaran Program Keluarga Berencana ini. Dalam LPJ yang dihasilkan tidak pernah ada masalah dan juga selalu tepat waktu, bahkan LPJ Kecamatan Peudawasering dijadikan sebagai contoh untuk desa-desa lainnya.”(Wawancara 27 Februari 2018).

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Program Keluarga Berencana ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan fisik yang terjadi di Desa.

Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Peudawa tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di desa

dengan masyarakat Kecamatan Peudawa. Dari 30 responden hanya ada 2 orang responden atau 6,67% yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan bersama masyarakat Kecamatan Peudawa dan sebanyak 24 orang responden atau 80% mengatakan bahwa pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat, adapun 6 orang lainnya mengatakan tidak tahu apakah pemerintah desa sudah melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah berjalan atau tidak.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat, yaitu Bapak Sujarwo yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kecamatan Peudawa jarang mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Kecamatan Peudawa ini, sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah ada permasalahan di desa atau tidak.”(Wawancara 28 Februari 2018)

Hasil wawancara diatas senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Bapak Isroq Suyoto yang menyatakan bahwa:

“Yang saya ketahui pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggungjawaban di hadapan masyarakat Kecamatan Peudawa ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Peudawa ini.”(Wawancara 27 Februari 2018)

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan di atas, maka walaupun secara Administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah Kecamatan Peudawa dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang

dihasilkan adalah hasil karya pihak ketiga dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Kecamatan Peudawa namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa. Maka tahapan peertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Peudawa dapat dikatakan kurang efektif.

9. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Program Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur Aceh Timur

Faktor-faktor yang menghambat pemerintah Kecamatan Peudawa dalam pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Kecamatan Peudawa sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan Program Keluarga Berencana, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur.

Baik Pemerintah Kecamatan Peudawa maupun masyarakat desa mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kecamatan Peudawa adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Program Keluarga Berencana, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola Program Keluarga Berencana yang di peroleh dari APBdesa.

Hasil wawancara dengan Bapak Juliarso sebagai Kepala Kecamatan Peudawa.

Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemerintah Kecamatan Peudawa sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di aparat pemerintah desa agar aparat pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparat desa miliki khususnya dibidang Pembangunan Fisik.

Hasil wawancara diatas senada dengan Bapak M. Husni Saragih, SH sebagai Sekretaris Kecamatan Peudawa menyatakan bahwa:

“Kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Peudawa sebagai faktor internal pada umumnya tergolong sangat rendah, yang disebabkan oleh pendidikan dari aparat pemerintah desa yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan.” (Wawancara 27 Februari 2018).

Begitu pula hasil wawancara dengan Juni Intani, S.Pd selaku Bendahara Kecamatan Peudawa yang menyatakan bahwa:

“Kami kesulitan dalam menyusun surat pertanggung jawaban untuk pencairan dana selanjutnya, karena lemahnya sumber daya manusia oleh aparat desa sebagian besar tidak memahami cara mengoperasikan komputer dengan baik sehingga lambat menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut. Selain itu sebagian dari data kadang-kadang tidak tersimpan.” (Wawancara 27 Februari 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pemabnguna fisik Di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Program Keluarga Berencana yang ada di Kecamatan Peudawa masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Kecamatan Peudawa.

Hal ini terbukti dengan ketidak mampuan pelaksana kegiatan pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam membuat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari Tim pelakasana pengelolaan Program Keluarga Berencana dan juga bukan merupakan bagian dari Perangkat Kecamatan Peudawa.

b. Informasi

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa tarkait Pengelolaan Program Keluarga Berencana masih kurang jelas.Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Program Keluarga Berencana yang diperoleh.Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Program Keluarga Berencana, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Program Keluarga Berencana tersebut.

Selain itu, Pengelolaan Program Keluarga Berencana dilakukan melalui

proses sosialisasi. Informasi yang di peroleh melalui sosialisai yang di adakan pemerintah Kecamatan Peudawa dalam proses Pengelolaan Program Keluarga Berencana belum cukup baik. Dimana dari 30 responden, semuanya sependapat bahwa sosialisasi Pengelolaan Program Keluarga Berencana dari pemerintah Kabupaten dan Kecamatan hanya sampai pada pemerintah desa selaku pelaksana Pengelolaan Program Keluarga Berencana.

Sedangkan kepada masyarakat tidak ada pelaksanaan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh salah satu anggota masyarakat, yaitu Bapak Sujarwo yang mengemukakan bahwa:

“Tidak pernah ada sosialisasi kepada kami terkait Pengelolaan Program Keluarga Berencana sebelumnya, jika memang ada pasti hanya bersifat perorangan karena saya pribadi tidak pernah mendapat informasi. Pada saat musrembang di adakan oleh pemerintah desa itu hanya jumlah anggaran yang disebutkan, terkait penggunaan anggaran itu tidak di jelaskan.” (Wawancara 28 Februari 2018).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh salah satu masyarakat terkait kurangnya informasi dari pihak pemerintah desa yakni Bapak Isroq Suyoto yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat tidak tahu mengenai tugas dantanggungjawab kami dalam setiap ada pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, karena kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah Kabupaten/Kota bahkan dari pemerintah desa kami tidak pernah mendapatkan informasi

mengenai setiap penggunaan anggaran ataupun kegiatan yang akan dilakukan di desa.”(Wawancara 27 Februari 2018).

Dari hasil penelitian bahwa kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Program Keluarga Berencana, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di desa.

c. Partisipasi Masyarakat

Peran partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Program Keluarga Berencana tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, sebagai Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta aparaturnya perlu menyadari bahwa dalam pengelolaan Program Keluarga Berencana dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan Program Keluarga Berencana dapat dialokasikan sesuai yang di rencanakan seperti, pembangunan pasar Kecamatan Peudawa, pembuatan sumur gali dan pengadaan bibit pala.

Namun yang terjadi Di Kecamatan Peudawa tidak terjadi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Program Keluarga Berencana, hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan. Berikut informasi yang diperoleh dari pernyataan Kepala Kecamatan Peudawa, Bapak Juliarso yang menyatakan bahwa:

“Dalam setiap tahapan Pengelolaan Program Keluarga Berencana yang dilakukan, partisipasi masyarakat masih sangat rendah dimana masyarakat yang hadir hanya sedikit, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan. Hal ini selain masyarakat punya kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap kegiatan desa sangat rendah.”(Wawancara 27 Februari 2018).

Hasil penelitian diatas senada dengan yang disampaikan Bapak M. Husni Saragih, SH sebagai Sekretaris Kecamatan Peudawa menyatakan bahwa:

“Proses Pengelolaan Program Keluarga Berencana dilakukan dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Namun setiap tahapan di laksanakan partisipasi masyarakat itu masih kurang.”(Wawancara 27 Februari 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pemabnguna fisik Di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur ini yaitu partisipasi masyarakat dalam proses Pengelolaan Program Keluarga Berencana yang ada Di Kecamatan Peudawa masih tergolong sangat rendah, terbukti dari setiap tahapan Pengelolaan Program Keluarga Berencana hampir tidak ada keterlibatan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Peranan BPMPKS dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana untuk Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kecamatan Peudawa

Masyarakat di kecamatan Peudawa yang belum menggunakan program KB masih banyak sekali disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari BPMPKS sehingga menyebabkan pemahaman masyarakat berkurang akan program keluarga berencana. Terkait proses Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kecamatan Peudawa kecamatan Aceh Timur Aceh Timur, Pemerintah Kecamatan Peudawa terlebih dahulu menyusun tim pelaksana Program Keluarga Berencana yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya, proses pengelolaan Program Keluarga Berencana terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Kecamatan Peudawa kurang efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran ADD serta bagaimana proses pengelolaan ADD, dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan Pengelolaan Program Keluarga Berencana menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam

mengikuti setiap tahapan proses Pengelolaan Program Keluarga Berencana, serta dalam proses musrembang pada tahapan perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses Pengelolaan Program Keluarga Berencana.

Selain begitu banyaknya aspirasi, kegagalan dalam tahapan perencanaan terlihat dari menggelembungnya dana pelaksanaan program desa lainnya yang kemudian menghapus program kerja lainnya yang telah direncanakan seperti yang terjadi pada program kerja pemilihan kepala desa dengan program kerja perjalanan dinas luar daerah sekretaris desa.

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan ADD di Kecamatan Peudawa, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Peudawa ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan pasar dengan anggaran Rp 175.152.000 dan pembuatan sumur gali dengan anggaran sebesar Rp 12.152.000, serta pengadaan bibit pala dengan anggaran sebesar Rp 96.680.000 dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Program Keluarga Berencana yang dilakukan di Kecamatan Peudawa belum efektif.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kecamatan Peudawa berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembangunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim

evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya, tahapan pertanggungjawaban Pengelolaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Peudawa, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggungjawaban kurang efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak disusun oleh Pemeintah Kecamatan Peudawa dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Kecamatan Peudawa. Maka tahapan petanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Peudawa dapat dikatakan kurang efektif.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Program Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik DiKecamatan Peudawa Kecamatan Aceh TimurAceh Timur

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Kecamatan Peudawa dalam proses Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembagunan fisik di Kecamatan Peudawa yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Program Keluarga Berencana yang ada di Kecamatan Peudawa masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Kecamatan Peudawa khususnya

bendahara Kecamatan Peudawa hanya tamatan SMA.

Hal ini terbukti dengan ketidakmampuan pelaksana kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari Tim pelaksana Pengelolaan Program Keluarga Berencana dan juga bukan merupakan bagian dari Perangkat Kecamatan Peudawa.

b. Informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Pengelolaan Program Keluarga Berencana adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Program Keluarga Berencana, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Program Keluarga Berencana masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Program Keluarga Berencana yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Program Keluarga Berencana, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Program Keluarga Berencana tersebut.

c. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Kecamatan Peudawa masih kurang baik. Hal ini dari setiap proses tahapan Pengelolaan Program Keluarga Berencana belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Program Keluarga Berencana.

Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Kecamatan Peudawa, dilakukan dengan tiga proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan Program Keluarga Berencana. Kondisi tersebut berdampak pula belum efektifnya pencapaian tujuan Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur Aceh Timur.

Hasil penelitian terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh masyarakat seperti tersebut diatas, juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldi (2012). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengelolaan Program Keluarga Berencana Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum efektif, beberapa kendala ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, serta tidak adanya pengawasan dari lembaga masyarakat utamanya BPD Aliantan sebagai lembaga desa yang bertugas untuk

mengawasi kinerja pemerintah desa.

Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat baik secara lembaga maupun individu dalam Pengelolaan Program Keluarga Berencana tentu sangat disayangkan. Sebab tujuan Pengelolaan Program Keluarga Berencana yang sekaligus menjadi semangat UU Desa adalah menciptakan masyarakat yang aktif dan mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai PerananBPMPKS dalam pelaksanaan program keluarga berencana dalam pelaksanaan Program KB di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur Aceh Timur, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Masyarakat di Kecamatan Peudawa yang belum menggunakan program KB masih banyak sekali, artinya dari jumlah KK yang besar masih ada sebagian besar yang tidak ikut program KB. Realita ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kemauan yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Peudawa masih cukup rendah. Apalagi jumlah masyarakat yang tidak mengikuti program KB semakin didukung dengan angka kelahiran yang setiap tahunnya meningkat.
2. Masyarakat di kecamatan Peudawa yang belum menggunakan program KB masih banyak sekali disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari BPMPKS sehingga menyebabkan pemahaman masyarakat berkurang akan program keluarga berencana. Efektifitas Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Kecamatan Peudawa Kecamatan Aceh Timur Aceh Timur, dimana dalam proses Pengelolaan Program Keluarga Berencana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan

Program Keluarga Berencana masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Kecamatan Peudawa kepada masyarakat Kecamatan Peudawa. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Program Keluarga Berencana dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Program Keluarga Berencana yang dilakukan di Kecamatan Peudawa masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kecamatan Peudawa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Kecamatan Peudawa serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Kecamatan Peudawa. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Program Keluarga Berencana tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Program Keluarga Berencana yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

3. Faktor-faktor penghambat efektifitas Pengelolaan Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kecamatan Peudawa yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi, Partisipasi Masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BPMPKS sangat penting peranannya dalam mensosialisasikan pelaksanaan program keluarga berencana di kecamatan Peudawa Aceh Timur karena Masyarakat di Kecamatan Peudawa yang belum menggunakan program KB masih banyak sekali.
2. Masyarakat di kecamatan Peudawa seharusnya lebih berpartisipasi dalam menggunakan program KB agar pemahaman masyarakat tidak berkurang akan program keluarga berencana. Sebagai Pemerintah Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, dalam proses Pengelolaan Program Keluarga Berencana yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Kecamatan Peudawa kepada masyarakat Kecamatan Peudawa. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Kecamatan Peudawa melakukan transparansi penggunaan anggaran Program Keluarga Berencana agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Program Keluarga Berencana sesuai yang di harapkan. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Kecamatan Peudawa sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Program Keluarga Berencana.
3. Sebagai Pemerintah Kecamatan Peudawa Aceh Timur perlun
4. ya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Program Keluarga Berencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi sebagai pengantar*. Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada
- Arjoso, S. *Rencana Strategis BKKBN*. Maret, 2005
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:
Edisi Baru Rajawali Pers
- BKKBN, 1999. *Kependudukan KB dan KIA*. Bandung, Balai Litbang.
- BKKBN.2011. *Kamus Istilah Kependudukan & Keluarga Berencana* , Jakarta:
Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi .
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metedologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*
Jakarta: Salemba Humanika.
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja
Rosdakarya
- Murtiningsih, Sri. 2007. *Materi KIE Keluarga Berencana*, jakarta:
Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN.
- Soemarno, Soerjono. 2002. *Ilmu Sosiologi sebagai pengantar*. Jakarta:
BKKBN 2015.*Istilah Kependudukan & Keluarga Berencana* , Jakarta:
Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi
- Ardiansyah, Fahmi. 2012. *Metedologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*
Jakarta: Salemba Grafika.
- BKKBN, 2014. *Kependudukan KB dan KIA*. Jakarta, Balai Litbang.
- Husni, T. *Rencana Strategis BKKBN*. Maret, 2015

DAFTAR WAWANCARA

PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA (BMPKS) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN PEUDAWA KABUPATEN ACEH TIMUR

Narasumber

Nama : Alfiandi

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Kepala BPMPKS Aceh Timur

1. Menurut Bapak/ Ibu apa program BPMPKS dalam pelaksanaan program keluarga berencana Aceh Timur khususnya di kecamatan peudawa?
2. Menurut Bapak/Ibu apa tujuan dari peran badan pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga sejahtera ?
3. Menurut Bapak/Ibuapa hambatan dalam mencapai pelaksanaan program keluarga berencana aceh timur khusus nya di kecamatan peudawa ?
4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya dalam mencapai pelaksanaan program keluarga berencana aceh timur khusus nya di kecamatan peudawa?
5. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana pengawasan pelaksanaan program keluarga berencana aceh timur khususnya di kecamatan peudawa?

Narasumber

Nama : Cut Nanda

Umur : 32 Tahun

Jabatan : Tokoh Masyarakat penerima program KB

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana aceh timur khususnya di kecamatan Peudawa?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan program keluarga berencana aceh timur khusus nya kecamatan peudawa?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan program keluarga berencana aceh timur khusus nya di kecamatan peudawa?

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya MUHAMMAD AIDIL HARIYANDI, NPM 1403090007, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan



MUHAMMAD AIDIL HARIYANDI

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD AIDIL HARIYANDI**
 N P M : 1403090007
 Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Judul Skripsi : **PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA (BPMPKS) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN ACEH TIMUR**

Medan, 23 Maret 2018

PEMBIMBING


Dra. YUSRINA TANJUNG, M.AP

DISETUJUI OLEH:
 KETUA JURUSAN,


Dr. ARIFIN SALEH, M.SP

PIA DEKAN,


Dr. RUDIANTO, M.Si



BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD AIDIL HARIYANDI**
 N P M : 1403090007
 Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
 Waktu : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. EFENDI AUGUS, M.Si**

PENGUJI II : **Drs. ABDUL JALAL BATUBARA, M.AP**

PENGUJI III : **Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. RUBIANTO, M.Si

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FISIP UMSU.
di
Medan. Medan, 11 NOVEMBER.....2017.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : M. AIDIL HARIYANDI
N P M : 1403090007
Jurusan : IKS
Tabungan sks : 127.... sks, IP Kumulatif 3,48..

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Timur	X
2	Peran BMPKS (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan keluarga sejahtera) Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Timur.	ACE TA PROK 11/11 2017 Arief
3	Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Aceh Timur	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 11.11.....2017.

Ketua,
Arief
(.....)

Pemohon,

(M. AIDIL HARIYANDI...)



Teguh, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**

Nomor : 208 /SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tertanggal 11 November 2017 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **M. AIDIL HARIYANDI**
 NPM : 1403090007
 Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2017 / 2018
 Judul Skripsi : **PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA (BPMPKS) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN ACEH TIMUR.**

Pembimbing : Dra.Yurisna Tanjung., M.AP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal: 11 November 2018.

Ditetapkan di Medan,

Pada tanggal : 24 Safar 1439 H

13 November 2017 M

Dekan

 Drs. Tasrif Syam., M.Si.

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. Di Medan;
3. Pertiinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 27 DESEMBER 2017.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : M. AIDIL HARIYANDI
 N P M : 1403090007
 Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 208./SK/IL.3/UMSU-03/F/2017.. tanggal 11 NOVEMBER 2017.. dengan judul sebagai berikut :

PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA (BPM.PKS) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN PEUDARA KABUPATEN ACEH TIMUR

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menvetujui :

Pembimbing

(M. AIDIL HARIYANDI)

Pemohon,

Aceef

(M. AIDIL HARIYANDI.....)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 348/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2017

Program studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Jum'at, 29 Desember 2017
W a k t u : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : ARIFIN SALEH, Dr, M.SP

No.	Nama Mahasiswa/Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	RAHMAD RIZKY	1403090039	1 YURISNA TANJUNG, Dra, M.AP	1 MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL REHAB RUMAH TIDAK LAYAK TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL
7	MELISA OCTAVANY	1403090035	1 MOHD. YUSRI, Dr, M.Si	1 YURISNA TANJUNG, Dra, M.AP	EFEKTIVITAS PELAYAN BPJS TERHADAP PASIEN BANTUAN IURAN (PB!) DI RUMAH SAKIT UMUM SIBOLGA
8	M. AIDIL HARIYANDI	1403090007	1 MOHD. YUSRI, Dr, M.Si	1 YURISNA TANJUNG, Dra, M.AP	PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA (BPMPKS) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN PEUDAWA KABUPATEN ACEH TIMUR
9	APRILIA HERLIN	1403090013	1 MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	1 MOHD. YUSRI, Dr, M.Si	TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI E DPRD SUMUT TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI SUMATERA UTARA
10	MHD. FAHMI TANJUNG	1403090042	1 MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	1 MOHD. YUSRI, Dr, M.Si	PERANAN INDUSTRI EKSTRAKTIF BERBASIS PERIKANAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA MISKIN DI WILAYAH PESISIR (Studi Kasus di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah)

Medan, 10 Rabiul Akhir 1439 H
29 Desember 2017 M
Dekan

Drs. TASRIF SYAM, M.Si.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : M. AIDIL HARIYANDI
 N P M : 1403090007
 Jurusan : IKS
 Judul Skripsi : PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA (BPMPKS) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN PEUDAWA KABUPATEN ACEH TIMUR

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	7/Nov/2017	Bimbingan dan Revisi Bab I s/d Bab III	WR
2.	10/Nov/2017	Bimbingan dan Revisi Bab 1 s/d Bab III	WR
3.	28/Nov/2017	Bimbingan Bab 1 s/d Bab III	WR
4.	12/Des/2017	Bimbingan & Revisi Bab III	WR
5.	27/Des/2017	Acc Proposal Skripsi	WR
6.	23/Jan/2018	Bimbingan Panduan Wawancara	WR
7.	22/Mar/18	Bimbingan Bab 4 & 5	WR
8.	22/Mar/18	Bimbingan Abstrak & Daft	WR
9.	23/Mar/18	Bimbingan Daftar Isi	WR
10.	25/Mar/18	Acc Skripsi	WR

Medan, 23 Maret 2018

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing kea...

(.....)

(.....)

(.....)



Zhigadil, Cerdas & Terperanya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : **384** / KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Medan, 21 Djumadil Akhir 1439 H

Lampiran : -.-

09 Maret 2018 M

Hal : **Mohon Diberikan izin**
Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth,
 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,
 Perempuan Dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS)
 Aceh Timur
 di-
 Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **M. AIDIL HARIYANDI**
 N P M : 1403090007
 Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018
 Judul Skripsi : **PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA (BPMPKS) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN PEUDAWA KABUPATEN ACEH TIMUR.**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,
 Dekan I

Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

Komplek Pusat Pemerintahan Jl. Medan - Banda Aceh Km. 370 Gampong Titi Baroe
Email : dppakb.acehtimur@gmail.com

IDI

Kode Pos 24454

Hal : Balasan

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
Dr. Arifin Saleh Siregar
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AZHARI, S.Pd, M.Si
NIP : 196903081991031007
Jabatan : Kepala BPMPKS Aceh Timur

Menerangkan bahwa,

Nama : M. AIDIL HARIYANDI
No. Mhs : 1403090007
Mahasiswa : UMSU

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

**“Peranan BPMPKS Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan
Peudawa Kabupaten Aceh Timur”**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Aceh Timur, 15 Maret 2018

Hormat kami,
Kepala BPMPKS Aceh Timur

